

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;

- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 048 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan -LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa

	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
	3.4.1	Aset
	3.4.2	Kewajiban
	3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Pajak				
2	Pajak				
3	Retribusi				
4	Retribusidll				
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.

Realisasi pendapatan sebesar Rp NIHIL dari target yang ditetapkan Rp NIHIL atau NIHIL %.
2.

Realisasi pendapatan NIHIL lebih/(kurang) dari anggaran disebabkan NIHIL

(jelaskan alasan jika realisasi kurang dari target/anggaran, untuk keperluan menjawab pertanyaan **Evaluasi Gubernur**)

b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Belanja Pegawai	4.302.748.000,00	3.653.637.949,00	(649.110.051,00)	84.91
2	Belanja Barang dan Jasa	9.495.909.000,00	8.720.210.209,00	(775.698.791,00)	91,83
3	Belanja Modal	1.600.894.000,00	1.406.683.000,00	(194.211.000,00)	87.87
	Jumlah	15.399.551.000,0	13.780.531.158,00	(1.619.019.842,00)	89.49

1.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.653.637.949,00 dari target yang ditetapkan Rp 4.302.748.000,00 atau 84.91.%.
2.

Realisasi Belanja Brg Jasa sebesar Rp 8.720.210.209,00 dari target yang ditetapkan Rp 9.495.909.000,00 atau 91,83%.

3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.406.683.000,00 dari target yang ditetapkan Rp 1.600.894.000,00 atau 87.87 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 89.49 % dari yang dianggarkan Adapun belum maksimalnya total realisasi belanja salah satu penyebabnya dari realisasi belanja modal, hal ini dikarenakan sistem lelang pada belanja modal dimana pemenang lelang menetapkan harga lelang jauh dibawah total anggaran belanja modal sehingga mempengaruhi realisasi belanja keseluruhan.

1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
3. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
4. Anggaran yang tidak terserap sebagian besar bersumber pada kegiatan operasional di Balai Penyuluhan tingkat kecamatan yang mana seluruh pengeluaran riil menyesuaikan kebutuhan Balai Penyuluhan dan fenomena yang ada pengeluaran ditingkat Balai Penyuluhan pada tahun 2019 relative sedikit.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh SKPD adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018, maka realisasi pendapatan yang dikelola SKPD *NIHIL* Tahun 2019 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. *NIHIL* %.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola SKPD *NIHIL* setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp *NIHIL* Realisasi sebesar Rp *NIHIL*. atau *NIHIL* %. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar *NIHIL* % atau realisasi mencapai Rp *NIHIL*

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Hotel				
Hotel Melati III				
Hotel Melati II				
Hotel Melati I				
Losmen				
b. Pajak Restoran				
Restoran				
Rumah Makan				
c. Pajak Hiburan				
Bioskop				
Pagelaran Seni				
Arena Bilyard				
Hiburan Insedentil				
Permainan Ketangkasan				
Pertandingan				
Kolam Renang				
d. Pajak Reklame				
Papan/Bilboard/Megatron				
Kain				
Melekat/Stiker				
Reklame Selebaran				
e. Pajak Penerangan Jalan				
f. Pajak Bahan Galian C				
Batu Pecahan				
Pasir				
Batu Belah				
g. Pajak Sarang Burung Walet				
h. Pajak Air Bawah Tanah				
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
<i>Jumlah</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola SKPD *NIHIL* dapat terealisasi Rp *NIHIL* atau *NIHIL* % dari target sebesar Rp *NIHIL* sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pelayanan Kesehatan				
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK				
d. Parkir di Tepi Jalan Umum				

e. Pelayanan Pasar				
f. Pengujian Kendaraan Bermotor				
g. Pemakain Kekayaan Daerah				
h. Tempat Pelelangan				
i. Terminal				
j. Tempat Khusus Parkir				
k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan				
l. Rumah Potong Hewan				
m. Pelayanan Kepelabuhan				
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga				
o. Penjualan Prod Usaha Daerah				
p. Penutupan Jalan				
q. Ijin Mendirikan Bangunan				
r. Ijin Gangguan /Keramaian				
s. Ijin Trayek				
t. Ijin Jasa Konstruksi				
u. Ijin penebangan pohon jati				
v. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				
w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
x. Tanda Daftar Industri (TDI)				
y. Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan				
z. Ijin Pengangkutan hasil Hutan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp *NIHIL* dari yang direncanakan sebesar Rp *NIHIL* dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah				
PD Air Minum (PDAM)				
PD Perbengkelan				
PD Percetakan				
PD Farmasi				
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank				
PT. Bank Jateng				
PD Bank Puspakencana				
BKK Banjarharjo				
BKK Brebes				
c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga				
Dana Bergulir-Usaha Koperasi				
Dana Bergulir-Usaha Pertanian				
Dana Bergulir-Usaha Peternakan				
Dana Bergulir-Usaha Perikanan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp *NIHIL* dari yang direncanakan sebesar Rp *NIHIL* atau *NIHIL* % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan				
Penjualan Drum Bekas				
Penjualan Bongkaran Proyek				
b. Jasa Giro Kas Daerah				
c. Bunga Deposito				
Deposito pada BPD Jateng				
Deposito pada Bank Mandiri				
Deposito pada BRI				
Deposito pada Bank Bukopin				
Deposito pada BPR/BKK				
Deposito pada BTPN				
Deposito pada Bank Muamalat				
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah				
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja				
f. Penerimaan Lain-lain				
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri				
h. Penerimaan Pabrik Gula				
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 13.780.531.158,00 dari anggaran Rp. 15.399.551.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Operasi (BO)	13.798.657.000,00	12.373.848.158,00	89,67	13.167.301.285,00
b. Belanja Modal (BM)	1.600.894.000,00	1.406.683.000,00	87,87	884.778.976,00
c. Belanja Tak Terduga (BTT)				
d. Belanja Transfer (BT)				
Jumlah	15.399.551.000,00	13.780.531.158,00	89,49	14.052.080.261,00

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi,

hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 12.373.848.158,00 dari anggaran sebesar Rp. 13.798.657.000,00 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Pegawai	4.302.748.000,00	3.653.637.949,00	84.91	4.102.552.531,00
b. Belanja Barang dan Jasa	9.495.909.000,00	8.720.210.209,00	91.83	9.064.748.754,00
c. Belanja Bunga				
d. Belanja Subsidi				
e. Belanja Hibah				
f. Belanja Bantuan Sosial				
g. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah	13.798.657.000,00	12.373.848.158,00	89,67	13.167.301.285,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Gaji dan Tunjangan	3.120.368.000,00	2.634.808.949,00	84,44	2.989.757.031,00
b. Tambahan Penghasilan PNS	1.147.900.000,00	986.750.000,00	85,96	1.090.850.000,00
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah				
e. Biaya Pemungutan Retribusi				
f. Honorarium PNS				
g. Honorarium Non PNS				
h. Uang Lembur	34.480.000,00	32.079.000,00	93,04	21.945.500,00
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
k. Belanja BLUD				
l. Belanja BOS				
Jumlah	4.302.748.000,00	3.653.637.949,00	84.91	4.102.552.531,00

b.Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	734.860.000,00	619.867.762,00	84,35	695.288.567,00
b. Belanja Bahan/Material	126.655.000,00	115.360.500,00	91,08	135.621.300,00
c. Belanja Jasa Kantor	5.245.390.000,00	4.911.228.665,00	93,63	4.618.548.010,00
d. Belanja Premi Asuransi				102.808,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.245.000,00	102.106.460,00	67,96	79.555.097,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	110.452.000,00	87.639.150,00	79,35	139.951.700,00
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.650.000,00	21.160.000,00	76,53	18.900.000,00
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	159.000.000,00	134.000.000,00	84,28	83.900.000,00
i. Belanja Sewa Alat Berat				

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.100.000,00	13.300.000,00	94,33	22.475.000,00
k. Belanja Makanan dan Minuman	1.056.021.000,00	992.338.000,00	93,97	1.133.159.500,00
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
m. Belanja Pakaian Kerja	37.650.000,00	32.250.000,00	85,66	12.900.000,00
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	109.300.000,00	105.100.000,00	96,16	90.040.000,00
o. Belanja Perjalanan Dinas	968.362.000,00	955.578.172,00	98,68	949.165.072,00
p. Belanja Beasiswa Tugas Belajar				
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS				
r. Belanja Perjalanan Pindah Tugas				
s. Belanja Pemulangan Pegawai				
t. Belanja Pemeliharaan	205.475.000,00	190.164.500,00	92,55	13.579.500,00
u. Belanja Jasa Konsultansi				9.009.000,00
v. Belanja BLUD				
w. Belanja Barang-Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	174.499.000,00	112.167.000,00	64,28	426.153.200,00
x. Belanja Narasumber	372.250.000,00	323.950.000,00	87,02	631.305.000,00
y. Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	100	3.675.000,00
z. Honorarium Non PNS				1.420.000,00
Jumlah	9.495.909.000,00	8.720.210.209,00	91.83	9.064.748.754,00

c. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 sebesar Rp *NIHIL* merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

Barang Hibah	Jumlah	(Rp)	Penerima
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp. *NIHIL* merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp *NIHIL* terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp *NIHIL* dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp *NIHIL*

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.406.683.000,00. dari anggaran sebesar Rp 1.600.894.000,00 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. BM - Tanah				
b. BM - Peralatan & Mesin	1.390.368.000,00	1.197.833.000,00	86,15	551.279.976,00
c. BM - Gedung & Bangunan	210.526.000,00	208.850.000,00	99.20	333.499.000,00
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. BM - Aset Tetap Lainnya.				
Jumlah	1.600.894.000,00	1.406.683.000,00	87.87	884.778.976,00

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp *NIHIL* dari anggaran sebesar Rp *NIHIL*

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
Belanja Tak Terduga				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. *NIHIL* dari anggaran sebesar Rp *NIHIL*

Belanja Transfer :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagi Hasil - Pajak				
b. Bagi Hasil – Retribusi				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 dan 2018.

Pendapatan-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.427.112.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2019		
Pendapatan-LO	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)
1. Pendapatan Asli Daerah – LO				
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)
<i>Jumlah</i>	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO				
A. Pendapatan Pajak Daerah – LO				
B. Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
D. Lain-lain PAD Yang Sah – LO				
<i>Jumlah</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
2. Pendapatan Transfer - LO				
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -				

LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO				
D. Bantuan Keuangan - LO				
<i>Jumlah</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.427.112.155,00 dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
A. Pendapatan Hibah - LO	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)
B. Dana Darurat – LO				
C. Pendapatan Lainnya - LO				
<i>Jumlah</i>	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)

A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. Pendapatan Hibah - LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)
Dst.....				
<i>Jumlah</i>	4.427.112.155,00	5.033.394.622,00	(606.282.467,00)	(12,05)

Penjelasan :

- a.
- b.
- c. Pendapatan Hibah berupa barang adalah sebesar Rp 4.427.112.155,00, hibah yang diperoleh berupa Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah

B. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2019 sebesar NIHIL

C. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
C. Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
Dst....				
<i>Jumlah</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Penjelasan :

- a.
- b.

3.2.2 **Beban**

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
BEBAN				
A. Beban Operasi	12.913.032.072,52	18.679.442.810,00	(5.766.410.737,48)	(30.87)
B. Beban Transfer				
<i>Jumlah</i>	12.913.032.072,52	18.679.442.810,00	(5.766.410.737,48)	(30.87)

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. BEBAN OPERASI				
1. Beban Pegawai	3.618.378.324,00	4.178.266.745,00	(559.888.421,00)	(13,40)
2. Beban Persediaan	1.953.255.411,52	7.148.233.938,00	(5.194.978.526,48)	(72,67)
3. Beban Jasa	5.397.920.663,00	5.348.858.883,00	49.061.780,00	0,92
4. Beban Pemeliharaan	132.820.960,00	93.134.597,00	39.686.363,00	42,61
5. Beban Perjalanan Dinas	955.578.172,00	949.165.072,00	6.413.100,00	0,68

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
3. Beban Bunga				
4. Beban Subsidi				
5. Beban Hibah	113.166.000,00	426.153.200,00	(312.987.200,00)	(73,44)
6. Beban Bantuan Sosial				
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	741.912.542,00	535.630.375,00	(533.830.375,00)	(99,66)
8. Beban Penyisihan Piutang				
9. Beban Lain-lain				
Jumlah	12.913.032.072,52	18.679.442.810,00	(5.766.410.737,48)	(30,87)

(Khusus untuk SKPD Dindikpora, uraian dibawah ini diisi) :

- Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS, Dana BOS SD/SMP dipergunakan untuk pengeluaran biaya operasional sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Uraian	Kode Rek	Nama Rek	Jumlah
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- Adapun rincian penggunaan Dana BOS sebagai berikut :

Rincian Penggunaan Dana BOS SD/SMP	Nilai (Rp)
Jumlah	NIHIL

3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2019 sebesar Rp 113.166.000,00 merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 113.166.000,00 Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2018		Pengadaan 2019		Diserahkan 2019		Reklasifikasi AT		Sisa 2019	
Jml	Jumlah	Jml	Jumlah (Rp)	Jml	Jumlah (Rp)	Jml	Jumlah (Rp)	Jml	Jumlah

Brg	(Rp)	Brg		Brg		Brg		Brg	(Rp)
		9	53.271.000,00	9	53.271.000,00				
		10	59.895.000,00	10	59.895.000,00				
		19	113.166.000,00	19	113.166.000,00				

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban penyusutan aset tetap tahun 2019 adalah sebesar Rp 741.912.542,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 647.515.746,00
 - b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 92.596.796,00
 - c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
 - d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp
 - Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp 1.800.000,00.

5. Beban Penyisihan Piutang
- Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp *NIHIL* terdiri dari :
- a. Penyisihan Piutang Pajak Rp *NIHIL*
 - b. Penyisihan Piutang Retribusi Rp *NIHIL*
 - c. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Rp *NIHIL*
 - d. Penyisihan Piutang Transfer Rp *NIHIL.*
 - e. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp *NIHIL.*
 - f. Penyisihan Piutang BLUD Rp *NIHIL*
 - g. Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR Rp *NIHIL*
 - h. Penyisihan Piutang Lain-lain Rp *NIHIL*

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penuruna)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			578.799.996,00	
JUMLAH			578.799.996,00	
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		7.064.100,00	(7.064.100,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan	%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3.605.442.894,00	21.176.520,00	3.584.266.374,00	16.925,66
JUMLAH	(3.605.442.894,00)	(28.240.620,00)	(3.577.202.274,00)	12.666,87
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	(3.605.442.894,00)	(28.240.620,00)	(3.577.202.274,00)	12.666,87

Penjelasan :

1. Pada tahun 2019 dilaksanakan penghapusan. Adapun barang yang berstatus rusak berat yang telah dihapus sebesar Rp 52.173.928,00. dengan Berita Acara Penghapusan Nomor 050/806/2019 tanggal 23 Desember 2019.
2. Barang-barang yang telah dihapus tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp *NIHIL* dan penerimaan kas daerah atas penjualan sebesar Rp *NIHIL* Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai *) Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp *NIHIL*
- *)*pilih salah satu*

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp *NIHIL* dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp *NIHIL*

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018.

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.366.565.069,00 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp .6.531.992.172,52 ditambah Surplus-LO TA 2019 sebesar Rp (12.091.362.811,52) dikurangi koreksi ekuitas TA 2019 sebesar Rp 145.404.551,00

Rincian Koreksi Ekuitas sebagai berikut :

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Kas		
Koreksi Nilai Piutang		
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		
Koreksi Beban Dibayar di Muka		
Koreksi investasi		
Koreksi Nilai Tanah		
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	217.908.050,00	
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan		(16.475.000,00)

Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(117.985.641,00)	8.237.500,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(1)	
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		
Koreksi Utang Belanja		(9.382.978,00)
Koreksi Awal Aset Tetap		
Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Koreksi Awal Aset Lain-lain		
Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain		45.313.002,03
Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya	45.482.142,00	(71.575.143,00)
Jumlah	145.404.551,00	(43.882.618,97)

(koreksi aset pada LPE hanya yang berkaitan dengan penurunan nilai aset tahun-tahun sebelumnya, sedangkan koreksi atas tahun ybs/th 2019 mempengaruhi Laporan-LO yaitu dicatat sebagai Pendapatan-LO/Beban)

Penjelasan :

- Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Selisih Revaluasi Aset Tetap, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Koreksi Nilai Kas, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Koreksi Nilai Piutang, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
 - NIHIL
 - NIHIL
- Koreksi Nilai Investasi, merupakan :

- a. NIHIL
8. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp NIHIL
 - b. NIHIL
9. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp NIHIL
 - b. NIHIL
10. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
 - a. Koreksi saldo awal asset tetap sebesar Rp 6.758.950,00
 - b. Pencatatan penilaian barang berlebih, penyesuaian hasil sensus BMD sebesar Rp. 224.667.000,00
11. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL
12. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian Aset Tetap Lainnya Rp NIHIL
 - b. NIHIL
13. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan Rp.(117.985.641,00)
 - b.
14. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Rp. (1) merupakan aset tetap yang belum dinilai. Aset tersebut berupa Balai Penyuluhan/UPT DP3KB Kec. Jatibarang pada tahun 2019 telah dinilai dan telah dicatat sebagai aset tetap
15. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL
16. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL
17. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL
18. Koreksi Awal Aset Tetap, merupakan :
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL
19. Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :

- a. NIHIL
 - b. NIHIL
20. Koreksi Awal Aset Lain-lain, merupakan :
- a. NIHIL
 - b. NIHIL
- 21.Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain, merupakan :
- a. NIHIL
 - b. NIHIL
22. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap, merupakan :
- a. Mutasi masuk aset tetap dari Dinkes (Toyota Kijang Inova 2.0 A/T, G 22 G
Rp. 45.482.142,00
 - b. Mutasi keluar aset tetap ke SKPD LAIN Rp. 400.928.193
 - c. Akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap Rp. 136.212.858,00
 - d. Akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap Rp. 264.793.193,00

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Aset Lancar	2.205.250.950,00	1.384.281.688,52
Aset Tetap	6.197.716.973,00	5.237.729.371 ,00
Aset Lainnya	25.988.407,00	7.200.001 ,00
Jumlah Aset	8.428.956.330,00	6.629.211.060,52
Kewajiban	62.391.261,00	97.218.888,00
Ekuitas	8.366.565.069,00	6.531.992.172,52
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	8.428.956.330,00	6.629.211.060,52

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah

yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	2.205.250.950.00	1.384.281.688,52
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	2.205.250.950.00	1.384.281.688,52

1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas BLUD		
Kas di JKN		
Kas di Bendahara FKTP		
Kas di Bendahara BOS		
Kas Lainnya (Kas BOS)		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 0 dan 0 Saldo Kas tahun 2019 sebesar Rp 0 terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp *NIHIL* Kas tersebut merupakan :
- a. *NIHIL*
- b. *NIHIL*
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp *NIHIL*. Kas tersebut merupakan :

- a. *NIHIL*
- b. *NIHIL*

3. Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp *NIHIL*

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas : Rp *NIHIL*
- BLUD Puskesmas : Rp *NIHIL*
- BLUD Puskesmas : Rp *NIHIL*
- BLUD Puskesmas : Rp *NIHIL*
- BLUD Puskesmas : Rp *NIHIL*
- Jumlah : Rp *NIHIL*

4. Kas Lainnya, merupakan Kas BOS sebesar Rp *NIHIL*. merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD : Rp *NIHIL* pada *NIHIL* SD Negeri
- SMP : Rp *NIHIL* pada *NIHIL* SMP Negeri

5. **Piutang**

Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lain-lain sebesar Rp *NIHIL*

Jenis Piutang	Nilai Piutang
Piutang Pendapatan	
1) Piutang Pajak Daerah	
2) Piutang Retribusi	
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi	
4) Piutang BLUD	
Piutang Lainnya	
1) Bag. Lancar TP-TGR	
2) Piutang Ex-Dana Bergulir	
Jumlah	<i>NIHIL</i>

PIUTANG PENDAPATAN

1) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 adalah Rp *NIHIL* dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Pajak		
Piutang Pajak		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

Saldo Piutang Pajak Tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
<u>Penambahan :</u>	
a. Piutang atas transaksi tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp <i>NIHIL</i>
c. dst	Rp <i>NIHIL</i>
<u>Pengurangan :</u>	
a. Setoran tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp <i>NIHIL</i>
c. dst	Rp <i>NIHIL</i>
Saldo Piutang Pajak Tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>

2) **Piutang Retribusi Daerah**

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
------------------------------------	-----------------

Penambahan :

a. Piutang baru atas transaksi tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp <i>NIHIL</i>
c. dst	Rp <i>NIHIL</i>

Pengurangan :

a. Setoran pada tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp <i>NIHIL</i>
c. dst	Rp <i>NIHIL</i>

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	Rp <i>NIHIL</i>
------------------------------------	-----------------

3) Piutang Pendapatan Non Pajak dan Non Retribusi

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp *NIHIL* Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2019	2018
			Rp	Rp
1.	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak			
2.	Piutang Kelebihan Pembayaran			
3.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan			
4.	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan			
	Dst			
	Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Penjelasan :

- Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan *NIHIL*. oleh *NIHIL (nama rekanan)*
- Piutang Kelebihan Pembayaran merupakan piutang atas kelebihan pembayaran *NIHIL* kepada *NIHIL (nama pihak ke-3)*
- Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan *NIHIL* Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			

3.			
	Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

4. Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan merupakan piutang atas denda keterlambatan pelaporan (*nama laporan*) yang harus diterima dari (*nama pihak yang wajib melaporkan*)

No	Uraian	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			
3.			
	Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

5)
Piutang BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp *NIHIL* Rincian Piutang BLUD pada SKPD *NIHIL* adalah sebagai berikut :

Piutang BLUD :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Piutang		
2. Piutang		
3. Piutang		
Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Penjelasan : (*disesuaikan dengan kondisi SKPD, penjelasan ini dapat dibuat lebih terperinci dengan lampiran tabel*)

1. Piutang sebesar Rp merupakan

3)
Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Putang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR.

Saldo piutang dimaksud adalah Rp *NIHIL* Rincian Bagian Lancar TP-TGR adalah sebagai berikut :

Nama	Saldo 2018	Mutasi 2019		Saldo 2019
	Rp	Tambah	Kurang	Rp

1) Piutang Pajak Daerah		-
2) Piutang Retribusi		-
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi		-
4) Piutang BLUD		-
Piutang Lainnya		
1) Bag. Lancar TP-TGR		-
2) Piutang Ex-Dana Bergulir		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

Saldo masing-masing rekening Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Pajak		-
2. Piutang Pajak		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Ret.		-
2. Piutang Ret.		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.		-
2.		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

Piutang Lainnya - Bagian Lancar TP-TGR	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

Piutang Lainnya - Ex-Dana Bergulir	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah	<i>NIHIL</i>	- <i>NIHIL</i>

3. Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Persediaan :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Bahan		699.999,52
2. Suku Cadang		
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
4. Obat-obatan	2.205.250.950,00	1.383.581.689,00
5. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
6. Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
7. Natura dan Pakan		
8. Persediaan Penelitian		
9. Persediaan Dalam Proses		
10. Persediaan Barang BOS		
Jumlah	2.205.250.950,00	1.384.281.688,52

Mutasi persediaan selama tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Bahan		191.478.971,00	191.478.971,00	-
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	699.999,52	744.128.441,00	744.828.440,52	-
Obat-obatan	1.383.581.689,00	4.451.722.155,00	3.630.052.894,00	2.205.250.950,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		113.166.000,00	113.166.000,00	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		992.338.000,00	992.338.000,00	
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
Persediaan Barang BOS				
JUMLAH	1.384.281.688,52	6.492.833.567,00	5.671.864.305,52	2.205.250.950,00

Penjelasan penambahan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	PENGADAAN TH 2019	REKLAS DARI PEMELIHA RAAN	REKLAS DARI B. BARANG DAN JASA	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	HUTANG PERSEDI AAN	JUMLAH PENAMBAHAN
Bahan		191.478.971,00						191.478.971,00
Suku Cadang								
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		744.128.440,52						744.128.440,52
Obat-obatan		24.610.000,00				4.427.112.155,00		4.451.722.155,00
Persediaan Untuk Dijual/Dise rahkan		112.167.000,00		999.000,00				113.166.000,00
Persediaan Utk Tujuan Strategis/B ergaja-jaga								
Natura dan Pakan		992.000,00						992.000,00
Persediaan Penelitian								
Persediaan Dalam Proses								
Persediaan Barang BOS								
JUMLAH		2.064.722.412,00		999.000,00		4.427.112.155,00		6.492.833.567,00

Penjelasan pengurangan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/- RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Bahan		191.478.971,00					191.478.971,00
Suku Cadang							
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		744.828.440,00					744.128.441,00

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Obat-obatan		24.610.000,00	3.605.442.894,00				3.630.052.894,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				113.166.000,00			113.166.000,00
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga							
Natura dan Pakan		992.338.000,00					992.338.000,00
Persediaan Penelitian							
Persediaan Dalam Proses							
Persediaan Barang BOS							
JUMLAH		1.953.255.411,52	3.605.442.894,00	113.166.000,00			5.671.864.305,52

Dari saldo tersebut tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Rekap barang Kadaluarsa dan Rusak sebagai berikut :

Barang Kadaluarsa/Usang

Persediaan :	Kadaluarsa	Usang
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak		
2. Obat-Obatan dan Alkes		
3. Bibit Tanaman/Ternak		
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga		
5. Persediaan Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Barang Rusak

Persediaan :	Saldo
	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	
2. Obat-Obatan dan Alkes	
3. Bibit Tanaman/Ternak	
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	
5. Persediaan Lainnya	
Jumlah	NIHIL

Dari saldo tersebut sebesar Rp *NIHIL* merupakan barang-barang yang direncanakan akan

diserahkan kepada masyarakat namun masih berada pada SKPD *NIHIL* Adapun rinciannya sebagaimana lampiran. *(buat lampiran yang diperlukan)*

B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1 . Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 11.808.514.878 dan Rp. 10.716.945.805 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap (kode 108)	2019	2018
	Rp	Rp
a. Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	6.792.562.555,00	6.269.001.532,00
c. Gedung dan Bangunan	4.944.467.650,00	4.352.209.600,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	21.250.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00	56.484.673,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(5.610.797.905,00)	(5.479.216.434,00)
Jumlah Aset Tetap	6.197.716.973,00	5.237.729.371,00

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian saldo akhir tahun 2019 pada akun aset tetap yang sebelumnya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan perubahan kodifikasi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Adapun perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan kodifikasi mempengaruhi saldo akhir aset tetap tahun 2019 dengan perubahan sebagai berikut :

VERSI PERMENDAGRI 108		VERSI PERMENDAGRI 64	
URAIAN	NOMINAL	URAIAN	NOMINAL
Tanah	18.000.000,00	Tanah	18.000.000,00
Tanah	18.000.000,00	Tanah	18.000.000,00
Peralatan Dan Mesin	6.792.562.555,00	Peralatan & Mesin	6.789.562.555,00
Alat Besar	38.320.000,00	Alat - alat Berat	38.320.000,00
Alat Angkutan	4.427.762.634,00	Alat -alat Angkutan	4.427.762.634,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		Alat Bengkel	
Alat Pertanian		Alat Pertanian & Peternakan	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.024.699.525,00	Alat -alat Kantor & RT	1.957.277.746,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	321.672.175,00	Alat Studio & Alat Komunikasi	358.172.175,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	8.030.000,00	Alat Ukur	
Alat Laboratorium		Alat - alat Kedokteran	8.030.000,00
Alat Persenjataan		Alat Laboratorium	
Komputer	969.078.221,00	Alat Keamanan	
Alat Eksplorasi			
Alat Pengeboran			
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Peraga			
Peralatan Proses/Produksi			
Rambu – Rambu			
Peralatan Olah Raga	3.000.000,00		
Gedung Dan Bangunan	4.944.467.650,00	Gedung & Bangunan	4.944.467.650,00
Bangunan Gedung	4.914.467.650,00	Bangunan Gedung	4.914.467.650,00
Monumen	30.000.000,00	Bangunan Monumen	30.000.000,00
Bangunan Menara			
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Jalan, Jaringan Dan Irigasi		Jalan,Irigasi & Jaringan	
Jalan Dan Jembatan		Jalan & jembatan	
Bangunan Air		Bangunan Air (Irigasi)	
Instalasi		Instalasi	
Jaringan		Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	53.484.673,00	Aset Tetap Lainnya	56.484.673,00
Bahan Perpustakaan	3.494.673,00	Buku & Perpustakaan	3.494.673,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	49.990.000,00	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	52.990.000,00
Hewan		Hewan/Ternak & Tumbuhan	
Biota Perairan			
Tanaman			
Barang Koleksi Non Budaya			
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Konstruksi Dalam Pengerjaan		Konstruksi dalam Pengerjaan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan		Konstruksi dalam Pengerjaan	
Jumlah	11.808.514.878,00	Jumlah	11.808.514.878,00

Mutasi aset tetap tahun 2019 sesuai klasifikasi Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN (RP)	PENGURANGAN (RP)	SALDO AKHIR
Tanah	18.000.000,00			18.000.000,00
Tanah	18.000.000,00			18.000.000,00
Peralatan Dan Mesin	6.269.001.532,00	1.540.014.000,00	1.019.452.977,00	6.789.562.555,00
Alat Besar	38.320.000,00			38.320.000,00
Alat Angkutan	4.224.886.683,00	1.034.020.000,00	831.144.049,00	4.427.762.634,00
Alat Bengkel				
Alat Pertanian & Peternakan				
Alat -alat Kantor & RT	1.592.242.331,00	503.044.825,00	138.009.410,00	1.957.277.746,00
Alat Studio & Alat Komunikasi	405.522.518,00	2.949.175,00	50.299.518,00	358.172.175,00
Alat Ukur				
Alat - alat Kedokteran	8.030.000,00			8.030.000,00
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Gedung & Bangunan	4.352.209.600,00	597.018.300,00	4.760.250,00	4.944.467.650,00
Bangunan Gedung	4.322.209.600,00	597.018.300,00	4.760.250,00	4.914.467.650,00
Bangunan Monumen	30.000.000,00			30.000.000,00
Jalan,Irigasi & Jaringan	21.250.000,00		21.250.000,00	
Jalan & jembatan				
Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi	21.250.000,00		21.250.000,00	
Jaringan				
Aset Tetap Lainnya	56.484.673,00			56.484.673,00
Buku & Perpustakaan	3.494.673,00			3.494.673,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	52.990.000,00			52.990.000,00
Hewan/Ternak & Tumbuhan				
Aset Tetap Renovasi				
Konstruksi dalam Pengerjaan				
Konstruksi dalam Pengerjaan				
JUMLAH	10.716.945.805,00	2.137.032.300,00	1.045.463.227,00	11.808.514.878,00

Penjelasan mutasi **penambahan** aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	1.197.833.000,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	208.850.000,00
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	1.406.683.000,00

b. Reklas dari Barang dan Jasa

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	9.151.000,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	

	JUMLAH	9.151.000,00
--	--------	--------------

c. Reklas dari Pemeliharaan

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	15.200.000,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	144.250.000,00
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	159.450.000,00

d. Mutasi Masuk

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	317.830.000,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	317.830.000,00

e. Koreksi Tambah

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	243.918.300,00
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	243.918.300,00

Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD menyesuaikan kertas kerja)

Penjelasan mutasi pengurangan aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mutasi Keluar

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	400.928.193,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	400.928.193,00

b. Koreksi Kurang

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	

01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.760.250,00
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	21.250.000,00
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	26.010.250,00

c. Reklas ke asset lainnya Rusak Berat

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	52.173.928,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	52.173.928,00

d. Penghapusan Barang B/RR

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	566.350.856,00
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	566.350.856,00

Dst *(disesuaikan dengan kondisi SKPD menyesuaikan kertas kerja)*

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. *NIHIL* dan Rp *NIHIL* Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP	Keterangan
1. Pekerjaan					
2. Pekerjaan					
3. Pekerjaan					
Jumlah	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Penjelasan : *(apabila nihil tidak perlu diberi penjelasan)*

- Pekerjaan tersebut bersumber dana dari *NIHIL* dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor *NIHIL* senilai Rp *NIHIL*. dengan jangka waktu pelaksanaan *NIHIL* hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp *NIHIL* Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
- Pekerjaan tersebut bersumber dana dari *NIHIL* dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor *NIHIL* senilai *NIHIL* dengan jangka waktu pelaksanaan *NIHIL*. hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp *NIHIL* Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp *NIHIL* Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan

dilaksanakan sesuai kontrak nomor *NIHIL* senilai Rp *NIHIL* dengan jangka waktu pelaksanaan *NIHIL* hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp *NIHIL* Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp *NIHIL*

Mutasi Aset Tetap terdiri dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Aset Tetap atas barang pengadaan tahun 2019.

Penambahan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas :

- Penambahan aset koreksi hasil sensus tahun 2019 Rp *NIHIL*;
- Penambahan aset dari belanja modal tahun 2019 Rp 1.406.683.000,00;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja persediaan tahun 2019 Rp;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pegawai tahun 2019 Rp.....;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja jasa tahun 2019 Rp.....;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pemeliharaan tahun 2019 Rp.....;
- Reklasifikasi dari barang yang diserahkan kepada pihak ke-3 Rp;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari pemerintah pusat Rp;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari pemerintah provinsi Rp;
- Penerimaan aset dari mutasi masuk dari SKPD lain Rp 317.830.000,00 sebagai berikut :
 - Dari Dinas Kesehatan Rp 317.830.000,00
- Pengadaan aset tetap belum dibayar (hutang aset tetap) Rp *NIHIL*, berupa *NIHIL*
- Reklasifikasi dari belanja Jasa Rp 9.151.000,00;
- Reklasifikasi dari belanja Pemeliharaan Rp 159.450.000,00;
- Koreksi penambahan lainnya sebesar 243.918.300,00 terdiri dari Penilaian Gedung Jatibarang Rp 224.667.000; dan kapitalisasi dari Instalasi Gedung Rp. 19.251.300,00

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas:

- Pengurangan asset koreksi hasil sensus Rp *NIHIL*;
- Tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (ekstrakomptabel) Rp *NIHIL*.;
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan Rp *NIHIL*;

- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp NIHIL.;
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Rp NIHIL.;
- Hibah keluar kepada NIHIL Rp NIHIL.;
- Mutasi ke SKPD lain/Unit Kerja Rp 400.928.193 sebagai berikut :

- Mutasi ke Puskesmas Losari	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Kecipir	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Kemurang Wetan	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Luwunggede	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Bulakamba	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Siwuluh	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Jatibarang	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Pamaron	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Kaligangsa	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Brebes	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Kalimati	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Jagalempeni	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Wanasari	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Bentar	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Bantarkawung	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Bumiayu	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Larangan	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Ketanggungan	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Cikakak	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Banjarharjo	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke RSUD Brebes	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Paguyangan	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke Puskesmas Kutamendala	Rp	5.919.000,00
- Mutasi ke BNK Brebes	Rp	137.012.624,00
- Mutasi ke Kecamatan Salem	Rp	26.409.434,00
- Mutasi ke Setwan	Rp	14.327.500,00
- Mutasi ke BPPKAD	Rp	62.174.025,00
- Mutasi ke Perwaskim	Rp	12.434.805,00
- Mutasi ke RSUD Brebes	Rp	12.434.805,00
-		
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset Rp NIHIL.;
- Koreksi kurang karena Kapitalisasi Gedung Rp 26.010.250,00.;

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Rusak Berat (RB) Rp 52.173.928,00;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Tidak Ditemukan (TD) Rp;
- Penghapusan barang Baik/Rusak Ringan Rp 566.350.856,00;
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud Rp NIHIL;
- Dst

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2019 sebagai berikut :

(diisi sesuai yang ada angkanya saja).....

Tabel Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat				
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung				
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(27.548.571,00)	(5.385.715,00)	(1,00)	(32.934.285,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(3.589.872.551,00)	(477.805.749,00)	(831.144.049,00)	(3.236.534.251,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor				
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor				
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara				
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin				
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin				
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur				
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan				
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan				
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(138.643.834,00)	(108.996.266)		(247.640.100,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat	(406.108.716,00)	(62.326.213,00)	(33.707.384,00)	(434.727.545,00)

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	Rumah Tangga				
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(610.227.991,00)	(147.266.362,00)	(1.405.809,00)	(756.088.544,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(63.630.864,00)	(31.804.236,00)		(95.435.100,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(48.591.667,00)	(4.554.835,00)	(20.076.667,00)	(33.069.835,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(202.133.045,00)	(55.479.600,00)	(30.513.045,00)	(227.099.600,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar				
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(4.998.000,00)	(1.606.000,00)		(6.604.000,00)
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan				
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium				
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah				
1.3.7.01.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir				
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika				
1.3.7.01.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan				
1.3.7.01.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)				
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup				
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika				
1.3.7.01.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api				
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api				
1.3.7.01.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi				
1.3.7.01.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar				
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan				
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(363.380.554,00)	(160.213.219,00)	(761.640,00)	(522.832.133,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(3.393.141,00)	(6.039.371,00)		(9.432.512,00)
1.3.7.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara				
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah		(8.400.000,00)		(8.400.000,00)
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	(7.800.000,00)		(7.800.000,00)	-
1.3.7.02.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan				

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	Candi				
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya				
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti				
1.3.7.02.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu				
1.3.7.02.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara				
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan				
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan				
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan				
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi				
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut				
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa				
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam				
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku				
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor				
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air				
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih				
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor				
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah				
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik				
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik				
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan				
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas				
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	(11.687.500,00)		(11.687.500,00)	
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum				
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan				

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
	Listrik				
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon				
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas				
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi				
1.3.7.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLUD				
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(1.200.000,00)		(1.200.000,00)	
1.3.7.04.05	Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga Lainnya				
	JUMLAH	(5.479.216.434,00)	(1.069.877.566,00)	(938.296.095,00)	(5.610.797.905,00)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :
(diisi sesuai yang ada angkanya saja).....

Tabel Penambahan Akumulasi Penyusutan

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin					
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat					
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung					
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(5.385.715,00)				(5.385.715,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(300.364.489,00)		(136.212.858,00)	(41.228.402,00)	(477.805.749,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor					
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor					
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara					
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin					
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin					
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur					
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan					

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan					
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(43.757.200,00)			(65.239.066,00)	(108.996.266,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(62.326.213,00)				(62.326.213,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(146.115.794,00)			(1.150.568,00)	(147.266.362,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(27.925.900,00)			(3.878.336,00)	(31.804.236,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(4.554.835,00)				(4.554.835,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(55.479.600,00)				(55.479.600,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar					
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(1.606.000,00)				(1.606.000,00)
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan					
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium					
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah					
1.3.7.01.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir					
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika					
1.3.7.01.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan					
1.3.7.01.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)					
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup					
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika					
1.3.7.01.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api					
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api					
1.3.7.01.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi					
1.3.7.01.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar					
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan					
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan					
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(88.225.540,00)			(71.987.679,00)	(160.213.219,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(3.771.256,00)			(2.268.115,00)	(6.039.371,00)
1.3.7.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan					

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
	Menara					
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	(600.000,00)			(7.800.000,00)	(8.400.000,00)
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan					
1.3.7.02.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi					
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya					
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti					
1.3.7.02.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu					
1.3.7.02.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara					
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan					
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan					
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan					
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi					
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut					
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa					
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam					
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah					
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku					
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor					
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air					
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih					
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor					
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah					
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan					
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik					
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik					
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan					

KODE	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN	HIBAH MASUK	MUTASI MASUK	KOREKSI (+)	JUMLAH PENAMBAHAN
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas					
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman					
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum					
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik					
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon					
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas					
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi					
1.3.7.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLUD					
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan					
1.3.7.04.05	Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga Lainnya					
	JUMLAH	(740.112.542,00)	0	(136.212.858,00)	(193.552.166,00)	(1.069.877.566,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :
(diisi sesuai yang ada angkanya saja).....

Tabel Pengurangan Akumulasi Penyusutan

KODE	URAIAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat				
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung				
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu			(1)	(1)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(566.350.856,00)		(264.793.193,00)	(831.144.049,00)
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor				
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak				

KODE	URAIAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
	Bermotor				
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara				
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin				
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin				
1.3.7.01.11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur				
1.3.7.01.12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan				
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan				
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor				
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga			(33.707.384,00)	(33.707.384,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.405.809,00)			(1.405.809,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio			(20.076.667,00)	(20.076.667,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(30.179.712,00)		(333.333,00)	(30.513.045,00)
1.3.7.01.20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar				
1.3.7.01.21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran				
1.3.7.01.22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan				
1.3.7.01.23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium				
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah				
1.3.7.01.25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir				
1.3.7.01.26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika				
1.3.7.01.27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan				

KODE	URAIAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
1.3.7.01.28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)				
1.3.7.01.29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup				
1.3.7.01.30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika				
1.3.7.01.31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api				
1.3.7.01.32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api				
1.3.7.01.33	Akumulasi Penyusutan Amunisi				
1.3.7.01.34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar				
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan				
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(761.640,00)			(761.640,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				
1.3.7.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara				
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah				
1.3.7.02.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan			(7.800.000,00)	(7.800.000,00)
1.3.7.02.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi				
1.3.7.02.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya				
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti				
1.3.7.02.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu				
1.3.7.02.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara				
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan,				

KODE	URAIAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
	Irigasi, dan jaringan				
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan				
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Jembatan				
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi				
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut				
1.3.7.03.05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa				
1.3.7.03.06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam				
1.3.7.03.07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
1.3.7.03.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku				
1.3.7.03.09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor				
1.3.7.03.10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air				
1.3.7.03.11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih				
1.3.7.03.12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor				
1.3.7.03.13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah				
1.3.7.03.14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan				
1.3.7.03.15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik				
1.3.7.03.16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik				
1.3.7.03.17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan				
1.3.7.03.18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas				
1.3.7.03.19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman	(11.687.500,00)			(11.687.500,00)
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum				
1.3.7.03.21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik				

KODE	URAIAN	PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI (-)	JUMLAH PENGURANGAN
1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon				
1.3.7.03.23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas				
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
1.3.7.04.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi				
1.3.7.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLUD				
1.3.7.04.04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan			(1.200.000,00)	(1.200.000,00)
1.3.7.04.05	Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga Lainnya				
	JUMLAH	(610.385.517,00)		(327.910.578,00)	(938.296.095,00)

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 25.988.407,00 dan Rp 7.200.001,00 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2019
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	34.000.000,00			34.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(26.800.000,00)	(1.800.000)		(28.600.000,00)
Aset Lain-lain	1,00	52.173.928,00	1	52.173.928,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(31.585.521,00)		(31.585.521,00)
Jumlah	7.200.001	18.788.407,00	1	25.988.407,00

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp 34.000.000,00 dan 34.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp 34.000.000,00 merupakan aset yang berupa Aplikasi Data PUS Rp. 9.000.000,00 dan SIM Kepegawaian dan Pelaporan Tahun 2013 Rp. 25.000.000,00

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut : NIHIL
 - a. Pengadaan aplikasi NIHIL Rp NIHIL
 - b. Koreksi penambahan saldo tahun 2018 karena NIHIL sebesar Rp NIHIL
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut : NIHIL
 - a. Penghapusan software NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - b. Koreksi pengurangan saldo tahun 2018 karena NIHIL sebesar Rp NIHIL

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 28.600.000,00 terdiri atas :

- Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebesar (26.800.000,00)
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp (1.800.000,00)
- Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldo tahun 2018 sebesar Rp
- Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldo tahun 2018 sebesar Rp
- Dst ...

3. Aset Lain-lain Rp 52.173.928,00 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB) yang telah tidak digunakan lagi untuk operasional SKPD sebesar Rp 52.173.928,00 dan ada pengurangan Rp. 1,00 untuk asset yg belum dinilai
- b. Aset tetap Tidak Ditemukan (TD) sebesar Rp NIHIL
Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB sebesar Rp . NIHIL, sedangkan yang belum dihapusbukukan dan masih tercatat pada KIB sebesar Rp . NIHIL

- b. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2018

Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- Penambahan merupakan DE 2019 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya Rp . NIHIL
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan Rp NIHIL
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku Rp NIHIL
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp NIHIL
- c. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp . NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Hibah Keluar Belum Dihapuskan

URAIAN	NOMINAL
Tanah	
Tanah	
Peralatan Dan Mesin	
Alat Besar	
Alat Angkutan	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
Alat Pertanian	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
Alat Laboratorium	
Alat Persenjataan	
Komputer	
Alat Eksplorasi	
Alat Pengeboran	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
Alat Bantu Eksplorasi	
Alat Keselamatan Kerja	
Alat Peraga	
Peralatan Proses/Produksi	
Rambu - Rambu	
Peralatan Olah Raga	
Gedung Dan Bangunan	
Bangunan Gedung	
Monumen	
Bangunan Menara	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
Jalan Dan Jembatan	

URAIAN	NOMINAL
Bangunan Air	
Instalasi	
Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Bahan Perpustakaan	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
Hewan	
Biota Perairan	
Tanaman	
Barang Koleksi Non Budaya	
Aset Tetap Dalam Renovasi	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Jumlah	NIHIL

d. Barang berlebih yang belum dinilai berupa Gedung Jatibarang Tahun 2018 sebesar Rp 1,00 dan tahun 2019 sudah dilakukan penilaian Gedung sehingga berkurang sebesar Rp 1,00 *(kalau ada, apabila lebih dari 1 jenis barang dapat dibuat table tersendiri)*

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan sebagai berikut :

Tabel Mutasi Ak. Penyusutan Barang Rusak Berat (RB)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Komputer	1.405.809,00		(1.405.809,00)		0
Alat Komunikasi	30.179.712,00		(30.179.712,00)		0
Alat Ukur					
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah	31.585.521,00		(31.585.521,00)		0

Tabel Mutasi Ak. Penyusutan Barang Tidak Ditemukan (TD)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Alat Kantor & Rumah Tangga					
Alat Studio & Komunikasi					
Alat Ukur					
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah					

Tabel Mutasi Barang Hibah Keluar Belum Dihapus

URAIAN	SALDO TH 2018	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah				
Alat Besar				
Alat Angkutan				
Alat Bengkel				

URAIAN	SALDO TH 2018	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Alat Pertanian & Peternakan				
Alat Kantor & Rumah Tangga				
Alat Studio & Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Bangunan Gedung				
Bangunan Monumen				
Jalan & jembatan				
Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi				
Jaringan				
Buku & Perpustakaan				
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
Hewan/Ternak & Tumbuhan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah				

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 62.391.261,00 dan Rp 97.218.888,00 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Th. 2019	Th. 2018
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Uang Muka dari Kas Daerah		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	62.391.261,00	97.218.888,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		
RK-PPKD		
Jumlah	62.391.261,00	97.218.888,00

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 Rp NIHIL, merupakan :

- Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa Pajak NIHIL sebesar Rp NIHIL, Pajak NIHIL sebesar NIHIL dst NIHIL Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. NIHIL

2. Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD)

Adapun mutasi Utang PFK tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO TH 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO TH 2019	KETERANGAN
Utang PPh 21					
Utang PPN					
Utang PPh 22					
Utang PPh 23					
Utang Titipan Kas Pihak ke-3					
Utang					
..... (dst)					
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 nihil.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2018 Rp

Pendapatan Diterima Dimuka :	2018	2017
	Rp	Rp
a.		
b.		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 nihil.

5) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 sebesar Rp 62.391.261,00 , dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2018	TAMBAH	KURANG	SALDO 2019
Belanja Pegawai	85.200.000,00	49.940.375,00	85.200.000,00	49.940.375,00
Belanja Barang/Persediaan				
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa	12.018.888,00	12.450.886,00	12.018.888,00	12.450.886,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Jumlah	97.218.888,00	62.391.261,00	97.218.888,00	62.391.261,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - Utang TPP bulan Desember yang belum dibayar sebesar Rp 49.940.375,00
 - Utang NIHIL sebesar Rp NIHIL
- b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan :
 - Utang atas pengadaan NIHIL. sebesar Rp NIHIL.
- c. Utang atas pengadaan NIHIL.. sebesar Rp NIHIL
- d. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
 - Utang atas Pemeliharaan NIHIL sebesar Rp NIHIL
 - Utang atas Pemeliharaan NIHIL sebesar Rp NIHIL.
- e. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - Utang atas Telp Kantor Desember sebesar Rp 59.008,00.-
 - Utang atas Tagihan Internet Desember sebesar Rp 6.187.178,00
 - Utang atas Tagihan Listrik sebesar Rp. 5.705.000,00
 - Utang atas Tagihan PDAM sebesar Rp. 499.700,00
- f. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp NIHIL

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - pembayaran utang TPP tahun 2018 sebesar Rp 85.200.000,00
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL
- b. Utang Belanja Barang merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL

- d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - Utang atas Tagihan Internet sebesar Rp 6.507.427,00
 - Utang atas Telp Kantor sebesar Rp 137.018,00.
 - Utang atas Tagihan Listrik sebesar Rp. 4.598.143,00
 - Utang atas Tagihan PDAM sebesar Rp. 776.300,00

- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp NIHIL

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2019 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp . NIHIL dan Rp. NIHIL

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang NIHIL sebesar Rp NIHIL merupakan NIHIL
2. Utang NIHIL Sebesar Rp NIHIL merupakan NIHIL
3. Utang Putus Kontrak atas pekerjaan fisik sebagai berikut :

Tabel Utang Aset Tetap Putus Kontrak

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.13.780.531.158,00

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca SKPD 8.366.565.069,00 per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 6.531.992.172,52 Perubahan atas ekuitas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019 :	NILAI (Rp)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018	6.531.992.172,52
Surplus/(Defisit)-LO	(12.091.362.811,52)
Koreksi Ekuitas	145.404.501,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	13.780.531.158,00
Jumlah	8.366.565.069,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi kesalahan pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp (13.780.531.158,00) Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (12.091.362.811,52) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. 1.689.168.346,48 Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Hubungan LRA-LO Tahun 2019

No	Uraian	Rp
A	Surplus/(Defisit) LRA	(13.780.531.158,00)
	Penambahan	
1	Belanja Modal	1.406.683.000,00
2	Reklasifikasi pemeliharaan ke Aset tetap	159.450.000,00
3	Reklasifikasi belanja Jasa ke Aset tetap	9.151.000,00
4	Utang Beban pegawai 2018 yang telah dibayar	85.200.000,00
5	Utang Beban Jasa 2018 yang telah dibayar	12.018.888,00
6	Saldo Akhir persediaan 2019	2.205.250.950,00
7	Mutasi Keluar persediaan 2019	3.605.442.894,00
8	Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3	113.166.000,00
9	Beban Jasa Reklas dari Barang diserahkan pihak ke 3	999.000,00
10	Pendapatan Hibah Masuk dari Pemerintah-LO	4.427.112.155,00
B	Jumlah Penambahan	12.024.473.887,00
	Pengurangan	
1	Saldo Awal 2019	1.384.281.688,52
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	741.912.542,00
3	Utang Beban Pegawai 2019 yang belum dibayar	49.940.375,00
4	Utang Beban Jasa 2019 yang belum dibayar	12.450.886,00
5	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya LO	3.605.442.894,00
6	Hibah MASuk Tahun 2019	4.427.112.155,00
7	Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3	113.166.000,00
9	Beban Jasa Reklas dari barang yang diserahkan pihak ke 3	999.000,00
C	Jumlah Pengurangan	10.335.305.540,52
D	Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)	(12.091.362.811,52)

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan :**
- Realisasi Belanja Modal

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp. 1.406.683.000,00 mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

2. Aset tetap Reklas dari pemeliharaan sebesar Rp. 159.450.000,00
3. Aset tetap Reklas dari belanja jasa Rp. 9.151.000,00
4. Pembayaran Utang beban Pegawai 2018, yang dibayar di tahun 2019 Rp. 85.200.000,00
5. Pembayaran Utang beban Jasa 2018, yang dibayar di tahun 2019 Rp. 12.018.888,00
6. Saldo Akhir persediaan Tahun 2019 Rp. 2.205.250.950,00
7. Mutasi Keluar persediaan Tahun 2019 Rp. 3.605.442.894,00
8. Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3 Rp. 113.166.000,00
9. Beban Jasa yang di reklas dari Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3 Rp. 999.000,00
10. Pendapatan Hibah berupa persediaan Alokon dari pemerintah Pusat Rp. 4.427.112.155,00

Pengurangan :

1. Saldo Awal tahun 2019 Rp. 1.384.281.688,52
2. Beban Akumulasi dan Amortisasi Rp. 741.912.542,00
3. Utang beban pegawai 2019 yang belum dibayar Rp. 49.940.375,00
4. Utang beban Jasa 2019 yang belum dibayar Rp. 12.450.886,00
5. Hibah Masuk Tahun 2019 Rp. 4.427.112.155,00
6. Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3 Rp. 113.166.000,00
7. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Rp. 3.605.442.894,00
8. Beban Jasa yang di reklas dari Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3 Rp. 999.000,00

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan piutang tahun 2019Rp NIHIL

Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya (Rp NIHIL)

JumlahRp NIHIL

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2019 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pajak Hotel		
2	Pajak Restoran		
3	Pajak Hiburan		
4	Pajak Reklame		
5	PPJ PLN		
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Air Tanah		
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan		
9	Pajak Bumi dan Bangunan		
JUMLAH		NIHIL	NIHIL

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan piutang tahun 2019 :

- Piutang	Rp NIHIL
- Piutang	Rp NIHIL
Jumlah Penambahan	Rp NIHIL
- Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sblmnya	Rp NIHIL
Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka	Rp.NIHIL
Jumlah Pengurangan	Rp NIHIL
Jumlah	Rp NIHIL

Pengurangan atas pendapatan diterima di muka adalah pengurangan atas pendapatan NIHIL yang telah disetorkan atas NIHIL untuk jangka waktu NIHIL tahun terhitung mulai NIHIL sampai dengan NIHIL

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih sebesar NIHIL antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO dengan LRA merupakan pembayaran atas NIHIL dan telah diakui sebagai pendapatan LO pada tahun NIHIL

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih sebesar Rp NIHIL antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

Penambahan atas piutang NIHIL tahun 2019	Rp NIHIL
--	----------

Pengurangan :

Pengurangan atas pembayaran piutang NIHIL	(Rp NIHIL)
Pengurangan atas piutang TGR NIHIL	(Rp NIHIL)

Pengurangan atas denda kegiatan tahun NIHIL

(Rp NIHIL)

B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp. 4.427.112.155,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
4.427.112.155,00	0	4.427.112.155,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

Dropping persediaan dari Provinsi	Rp 4.427.112.155,00
Hibah aset tetap dari	Rp NIHIL
Penambahan dari pihak ketiga	Rp NIHIL
Pengurangan NIHIL	(Rp NIHIL)
Jumlah	Rp NIHIL

2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan	Rp NIHIL
Pengurangan	(Rp NIHIL)
Jumlah	Rp NIHIL

D. SURPLUS NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp NIHIL merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
Jumlah		NIHIL

2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
	Surplus Mutasi Persediaan antar SKPD - LO	
	(penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap)	
Jumlah		

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Rp 35.259.625,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
3.618.378.324,00	3.653.637.949,00	(35.259.625,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	3.653.637.949,00
	Penambahan :	
	- Utang TPP th 2018 yang dibayar pada th 2019	85.200.000,00
	Pengurangan :	

No	Uraian	Nilai (Rp)
	- Utang TPP th 2019 yang dibayar pada th 2020	49.940.375,00
	Beban Pegawai LO	3.618.378.324,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp 574.443.539,52 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	1.953.255.411,52	2.064.722.412,00	(111.467.000,48)
2	Beban/Belanja Jasa	5.397.920.663,00	5.407.638.665,00	(9.718.002,00)
4	Beban/Belanja Perjalanan	955.578.172,00	955.578.172,00	-
5	Beban/Belanja Pemeliharaan	132.820.960,00	292.270.960,00	(159.450.000,00)
6	Beban/Belanja Hibah	113.166.000,00		113.166.000,0
7	Beban/Penyusutan dan Amortisasi lainnya	741.912.542,00		741.912.542,00
	Dst			
	Jumlah	9.294.653.748,52	8.720.210.209,00	574.443.539,52

1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp (111.467.000,48) terdiri atas :

Penambahan :

Persediaan Awal Rp. 1.384.281.688,52
Hibah Masuk Alokon dari pemerintah Pusat Rp. 4.427.112.155,00
Reklas dari jasa kegiatan ke Barang yg diserahkan pada pihak ke 3 Rp 999.000,00

Pengurangan :

Persediaan Akhir thn 2019 Rp 2.205.250.950,00
Mutasi keluar Rp 3.605.442.894,00
Barang yang diserahkan kepada pihak ke 3 Rp 113.166.000,00

Jumlah Rp (111.467.000,48)

2) Selisih antara beban jasa di LO dengan Belanja Jasa di LRA senilai Rp (9.718.002,00) terdiri atas :

Penambahan :

- Utang Jasa 2019 yang blm dibayar Rp 12.018.888,00
- Reklasifikasi dari Beban Jasa Kegiatan Rp 10.150.000,00

Pengurangan

- Utang Jasa 2018 yang telah dibayar Rp 12.450.886,00

Jumlah

Rp (9.718.002,00)

3) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
955.578.172,00	955.578.172,00	0

4) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA senilai Rp (159.450.000,00)

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
132.820.960,00	292.270.960,00	(159.450.000,00)

terdiri atas :

Penambahan :

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp NIHIL

Pengurangan :

- reklasifikasi belanja pemeliharaan ke aset tetap (Rp 159.450.000,00)

Jumlah Rp (159.450.000,00)

6) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp terdiri dari :

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penambahan :

- Beban yang belum terbayar sampai akhir tahun Rp NIHIL

- Belanja Non APBD dari Rp NIHIL

- Reklasifikasi dari beban barang dan jasa lainnya Rp NIHIL

Dst ...

Pengurangan :

- Pembayaran utang tahun sebelumnya Rp NIHIL

Jumlah Rp NIHIL

7) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai Rp NIHIL terdiri dari :

- Reklasifikasi dari ke Beban Rp NIHIL

- Reklasifikasi dari ke Beban

Rp NIHIL

Jumlah

Rp NIHIL

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp 113.166.000,00

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
113.166.000,00		113.166.000,00

Selisih tersebut merupakan Reklasifikasi Beban barang diserahkan kepada pihak ke 3 ke beban hibah

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp NIHIL memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp NIHIL memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

Selisih tersebut merupakan NIHIL

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp.741.912.542,00

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp NIHIL

8. Belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp NIHIL, namun tidak dicatat pada Laporan Operasional.
9. Belanja Tak Terduga

3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp NIHIL

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp NIHIL

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp 3.605.442.894,00 yang merupakan defisit karena mutasi persediaan antar SKPD .

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1 UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, Keududukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang dipimpin oleh seseorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah membantu Bupati Brebes dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak

4.1.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) membawahi :

1. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Program dan Keuangan
2. Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kasi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
 - b. Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - b. Kasi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan
4. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kasi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

4.1.4 PERSONALIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki 126 personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 8 (delapan) orang Kasubag/Kasubid, 47 (Empat Puluh Tujuh) orang Penyuluh KB, 16 (Tujuh Belas) orang staf di

PNS, 0 orang tenaga honorer, 16 (Enam Belas) orang tenaga kontrak di kantor dan 34 (tiga puluh empat) orang tenaga kontrak di balai penyuluhan kecamatan.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES

dr. SRI GUNADI PARWOKO, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199010 1 002